

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 33
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (Konsinering)
Dengan	: Pejabat Esselon I Kementerian Dalam Negeri dan BNPP
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Jum'at, 11 September 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Hotel Sari Pan Pacifik – Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Membahas Realisasi Anggaran 2015 dan Rencana Kerja serta Pagu Anggaran 2016.2. Kebijakan terkait Daerah Otonomi Baru dan Grand Design Penataan Daerah3. Membahas Pengawasan Pemerintah Desa dan Dana Desa4. Pengembangan IPDN dari segi institusi dan sistem pendidikan5. Kebijakan terkait Pengelolaan Perbatasan.
Ketua Rapat	: Dr. Wahidin Halim, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 31 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada hari Jum'at, 11 September 2015 dibuka pada pukul 14.25 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Wahidin Halim, M.Si dan dinyatakan tertutup untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan Realisasi Anggaran 2015 dan Rencana Kerja serta Pagu Anggaran 2016, Kebijakan terkait Daerah Otonomi Baru dan Grand Design Penataan Daerah, Pembahasan Pengawasan Pemerintah Desa dan Dana Desa, Pengembangan IPDN dari segi institusi dan sistem pendidikan, Kebijakan terkait Pengelolaan Perbatasan.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Terhadap Pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2016 sebesar Rp. 4.968.104.645.000,- dan pagu anggaran BNPP tahun 2016 sebesar Rp.

200.599.529.000,- Komisi II DPR RI akan membahas secara lebih mendalam pada Raker/ RDP yang akan datang. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memprioritaskan 4 (empat) hal yakni peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan sarana dan prasarana kantor/pemerintahan desa, pembentukan daerah otonom baru, dan IPDN. Serta kepada BNPP untuk memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan.

- B. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP untuk lebih meningkatkan kinerja agar realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 pada sisa waktu yang ada di tahun anggaran 2015 dapat lebih optimal.
- C. Komisi II memandang keberadaan IPDN tetap diperlukan dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan IPDN agar mampu mengatasi tantangan serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.
- D. Terhadap tindak lanjut 65 RUU dan 22 RUU tentang pembentukan Daerah Otonom Baru yang merupakan usul inisiatif DPR RI periode keanggotaan 2009-2014 dan usulan lainnya, Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan pendalaman pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait mekanisme dan penetapan tata cara pembahasan pada tanggal 22 atau 23 September 2015
- E. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian penyusunan dan revisi regulasi terkait aspek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar mengintensifkan supervisi dan pendampingan terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

Jakarta, 11 September 2015
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Dr. Wahidin Halim, M.Si
A-440